

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERJADINYA  
PERBEDAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANTARA  
KABUPATEN DENGAN KECAMATAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
(Studi Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)**

**MUHAMMAD IQBAL <sup>\*</sup>  
Dr.Danial Syah,SH.,M.H. <sup>\*\*</sup>  
Dr.Indra Gunawan,SH.,M.H. <sup>\*\*\*</sup>**

**ABSTRAK**

Demokrasi merupakan pencerminan Pancasila sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini didasari oleh kehadiran negara yang demokratis sehingga negara mampu menjembatani terpilihnya wakil-wakil rakyat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.

Pengaturan hukum penghitungan suara pada pemilihan umum Peraturan penghitungan suara pada pemilihan umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU dan Peraturan Bawaslu. Sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam UU Pemilu, diatur dalam Pasal 448-Pasal 554. Pertimbangan hukum hakim atas perbedaan hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk. tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa

Disimpulkan bahwa Penghitungan Suara; Peraturan mengatur secara detail proses penghitungan suara di TPS, termasuk bagaimana suara sah dan tidak sah ditentukan. Peran Saksi: Untuk efektifitas penegakan UU Pemilu 2017, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penghitungan, Suara, Pemilu

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>\*\*</sup> Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE OCCURRENCE OF  
DIFFERENCES IN VOTE COUNTING RESULTS BETWEEN  
REGENCY AND DISTRICT INLEGISLATIVE  
GENERAL ELECTIONS**  
**(Study of Merauke Court Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)**

**MUHAMMAD IQBAL** \*  
**Dr.Danial Syah,SH.,M.H.** \*\*  
**Dr.Indra Gunawan,SH.,M.H.** \*\*\*

**ABSTRACT**

Democracy is a reflection of the fourth principle of Pancasila which reads "People's sovereignty led by the wisdom of deliberation and representation". This is based on the presence of a democratic state so that the state is able to bridge the election of people's representatives

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials".

Legal regulation of vote counting in general elections Regulations on vote counting in general elections are regulated in several laws and regulations, including the KPU Regulation and Bawaslu Regulation. Sanctions for perpetrators of criminal acts have been regulated in the Election Law, regulated in Articles 448-554. The judge's legal considerations regarding the differences in vote counting results that occurred in Court Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk. the purpose of criminal punishment which is not retaliation for the actions of the Defendants but aims to foster and educate the Defendants

It is concluded that Vote Counting; The Regulation regulates in detail the vote counting process at the TPS, including how valid and invalid votes are determined. Role of Witnesses: For the effective enforcement of the 2017 Election Law, Defendant I and Defendant II are sentenced to 10 (ten) months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 (three) months in prison.

Keywords: Accountability, Counting, Votes, Election

---

\* Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

\*\* Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

\*\*\* Advisor II Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra